



ISTIMEWA

**KEMITRAAN:** Gubernur Drs Cornelis MH didampingi Dubes Belanda dan Dubes Norwegia menandatangani Peluncuran Percontohan Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas di Provinsi Kalimantan Barat.

## Cegah Deforestasi dan Degradasi Hutan

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selalu ingin mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan hijau. Yakni menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan sosial.

"Untuk melaksanakan itu,

harus ada keterlibatan tiga komponen untuk melaksanakannya. Di antaranya pemerintah dan swasta serta keterlibatan masyarakat," ungkap Gubernur Cornelis ketika meluncurkan Percontohan Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas di

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

## Cegah Deforestasi dan Degradasi Hutan

Sambungan dari halaman 1

Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis (26/5).

Indonesia, khususnya Kalimantan, merupakan penyuplai terbesar dalam menjaga terjadinya pemanasan global. "Sebagai paru paru dunia kita harus menjaga hutan dan melestarikannya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kepedulian semua pihak terutama pihak swasta dan masyarakat," ujarnya.

Menurut Cornelis, semua pemangku kepentingan, baik dalam maupun luar negeri, harus bersama sama mencari solusi akan tantangan pertumbuhan hijau. Pendekatan landsekap yang sukses sangat tergantung pada kepemimpinan kuat pemerintah. "Sekarang ini kita tidak usah lagi saling menyalahkan, tetapi mulai sekarang kita harus berbuat dan melakukan *action* dalam menangani serta mencegah

pemanasan global," papar Cornelis.

Pada COP 21, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Sektor lahan berkontribusi sekitar 70-80 persen terhadap komitmen tersebut.

Komitmen tersebut juga menjadi perhatian enam gubernur di Indonesia yang tergabung dalam GCF Task Force sejak 2008. Enam Provinsi GCF tersebut memiliki tutupan hutan dan kawasan hutan 58 persen, dari total kawasan dan tutupan hutan di Indonesia. Selain itu 64 persen lahan gambut dan hutan gambut.

"Hutan dan lahan gambut memiliki potensi besar dalam menyumbang emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi dari sektor ini sangat perlu dilakukan terutama dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan," tegas Cornelis.

Sementara itu dalam Peluncuran Percontohan Kemitraan untuk Peman-

gunaan Berkelanjutan Berbasis Komoditas pertama telah ini dilakukan pihak swasta pertama kalinya di Kalbar dilakukan oleh pihak PT CUS dihadiri Presiden Direktur Hasjim Oemar dan PT IDH dihadiri Direktornya Fitriani Ardiansyah.

"Ini merupakan komitmen dari pihaknya untuk pembangunan berkelanjutan di Pov Kalbar, sehingga kemakmuran ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan dapat berjalan bersama. Pihaknya juga merasa bangga ikut memberikan kontribusi dan berperan bersamapemerintah menjaga serta melestarikan hutan," jelasnya.

Hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Duta Besar Kerajaan Belanda HE Rob Swartbol dan Duta Besar Kerajaan Norwegia HE Stig Traavik selaku Kepala Badan Restorasi Gambut serta enam gubernur yang tergabung dalam GCF, serta anggota DPR RI dan akademisi. (Nasir Humas)